

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Persentase laju pertumbuhan penduduk dunia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), jumlah penduduk dunia pada tahun 1930 mulanya adalah sebesar 2 miliar jiwa, jumlah ini meningkat pada tahun 1963 menjadi 3 miliar jiwa, lalu pada tahun 1975 bertambah lagi menjadi 4 miliar jiwa, dan pada tahun 2011 jumlah penduduk dunia sudah menunjukkan angka 7 miliar jiwa, dimana 237 juta jiwa di antaranya adalah jumlah penduduk Indonesia (BKKBN, 2014). Pada tahun 2018 lalu, jumlah penduduk Indonesia bahkan sudah mencapai 265 juta jiwa. Di Indonesia, ledakan penduduk sudah mulai terasa sejak awal abad ke-21. Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,36% dari total populasi atau sebesar 3 juta jiwa per tahun pada tahun 2016 (BPS, 2017). Jika dihitung, rata-rata lebih dari 8.000 bayi lahir setiap hari di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Di provinsi Jawa Tengah sendiri, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,71%. Jumlah penduduk provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah sebesar 33.774.141 jiwa dan pada tahun 2017 sudah meningkat hingga menjadi 34.257.865 jiwa. Hal ini selaras dengan yang terjadi di daerah-daerah kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten terluas di provinsi Jawa Tengah dengan luas 2.124,47 km<sup>2</sup> atau sebesar 6,48% dari total luas provinsi Jawa Tengah, memiliki jumlah penduduk sebesar 1.694.726 jiwa pada tahun 2015. Jumlah ini meningkat hingga 1.711.627 jiwa pada tahun 2017, atau dengan kata lain kabupaten Cilacap memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,5% (BPS, 2018). Jumlah ini akan terus bertambah jika upaya pengendalian jumlah penduduk tidak dilaksanakan secara konsisten. Dampak buruk dari ledakan penduduk adalah mengakibatkan mayoritas manusia dapat hidup kurang layak, hal ini dikarenakan ketersediaan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan jumlahnya terbatas.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mulai melakukan inisiasi langkah pengendalian penduduk sejak era pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967. Hingga pada tanggal 7 September 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat yang isinya antara lain adalah untuk membimbing dan mengkoordinasi serta mengawasi segala aspirasi dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana (KB), serta mengusahakan segera terbentuknya suatu badan atau lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana (KB) yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia lalu mendirikan Lembaga

Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus sebagai lembaga semi pemerintah, hingga kemudian dengan kemauan pengendalian penduduk dipertegas berimplikasi pada ditingkatkannya LKBN menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berstatus sebagai lembaga pemerintah non-Kementerian (BKKBN, 2019).

Pergerakan angka laju pertumbuhan penduduk, khususnya di provinsi Jawa Tengah dapat ditekan dengan adanya program Keluarga Berencana (KB). Pembangunan gerakan keluarga berencana nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, alih-alih soal kuantitas jumlah manusia. Pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan beberapa strategi terkait kelanjutan program Keluarga Berencana (KB), diantaranya yang terbaru adalah penggalan program Kampung Keluarga Berencana atau yang populer disebut dengan Kampung KB. Kampung KB merupakan salah satu bentuk penerapan pelaksanaan total dari program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, BKKBN, bersinergi dengan mitra kerja, pemegang kepentingan, instansi-instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tempat terselenggaranya program Kampung KB. Melansir dari laman web <http://kampungkb.bkkbn.go.id/>, Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Januari tahun 2016. Ada beberapa hal mengapa program Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana ini dibentuk, yaitu:

1. Program KB atau Keluarga Berencana tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru.
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
3. Penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
4. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ketiga yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas kelima, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia".
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB atau Keluarga Berencana guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

Daerah yang dipilih untuk menjadi *pilot project* Kampung KB harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah, dan yang pasti bukan daerah yang sudah maju, baik dari infrastruktur maupun pembangunan penduduk. Daerah di kabupaten Cilacap yang salah satunya dipilih untuk terselenggaranya program Kampung KB adalah di wilayah dusun Cikalong RW 06, desa Sidareja, kecamatan Sidareja.

Mendengar istilah “Kampung”, kesan yang muncul di benak setiap orang adalah suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung. Hal itu sesuai dengan apa arti kata kampung itu sendiri. Melansir dari laman web [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), kata “Kampung” dapat berarti:

1. Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah);
2. Desa; Dusun;
3. Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan;
4. Terbelakang (belum modern); berkaitan dengan kebiasaan di kampung; kolot; halaman daerah atau desa tempat kelahiran.

Kampung merupakan unsur desa dan komponen wilayah administrasi terkecil dari sebuah negara. Kampung adalah wilayah setingkat Rukun Warga (RW) atau dusun yang di dalamnya terdapat sekumpulan keluarga yang tinggal.

Program Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana di dusun Cikalong RW 06, desa Sidareja, kecamatan Sidareja, kabupaten Cilacap, sudah direncanakan sejak bulan Desember 2017, namun baru dapat diimplementasikan sejak bulan Agustus 2018 dan masih berjalan hingga saat ini. Dusun Cikalong memiliki luas wilayah kurang lebih 92,24 Ha yang terbagi menjadi 4 RW dan 20 RT, dengan jumlah penduduk 4.321 jiwa dan 1.326 KK. Sebagian besar penduduk dusun Cikalong bermata pencaharian sebagai pedagang dengan usaha pengelolaan tekstil, sembako serta industri rumah tangga lainnya (Arsip Pemerintah Desa Sidareja, 2018). Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk studi pendahuluan pada 27 Februari 2019 lalu kepada bapak Sunardi selaku salah satu tokoh masyarakat setempat, di wilayah kampung ini memang terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat terkait program Keluarga Berencana (KB), seperti masalah pernikahan usia dini, memiliki anak di luar pernikahan, memiliki anak dalam jumlah banyak di dalam sebuah keluarga, dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Sidareja mengerti dengan permasalahan-permasalahan sosial tersebut dan berusaha untuk mengatasinya, namun Pemerintah Desa Sidareja dalam usahanya mengimplementasikan suatu program kepada

masyarakat setempat bukan dengan tanpa kendala, terlebih jika program itu merupakan program baru. Kendala yang utama adalah karakteristik dari masyarakat setempat yang bisa dianggap masih memiliki pola pikir egosentris tradisional serta tidak jarang menganggap program pemerintah berlawanan dengan prinsip keagamaan. Kondisi tersebut menurut bapak Sunardi sangat tidak ideal dalam usaha pembangunan masyarakat melalui program Keluarga Berencana (KB) di wilayah itu jika kondisi semacam ini terus berlanjut. Penerapan program Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana di dusun Cikalong RW 06 memerlukan strategi yang tepat dalam proses penyampaiannya kepada masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan strategi komunikasi yang tepat dari Pemerintah Desa Sidareja kepada warga di dusun Cikalong RW 06 dengan keunikan karakteristiknya, agar program Kampung KB yang merupakan inovasi lanjutan program Keluarga Berencana (KB) dari pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik. Program yang baik tidak akan terlaksana dengan baik jika dalam proses penyampaian pesannya menggunakan strategi komunikasi yang kurang tepat bagi masyarakat setempat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sudah paparkan, maka peneliti menentukan rumusan masalah yaitu **"Bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Sidareja dalam Melaksanakan Program Kampung KB?"**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Sidareja dalam Melaksanakan Program Kampung KB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu mengenai strategi komunikasi dalam pelaksanaan program pemerintah Kampung KB di masyarakat oleh Pemerintah Daerah setingkat Desa dan juga membahas teori-teori dari para ahli terkait keilmuan komunikasi organisasi Pemerintah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan *overview* dari strategi komunikasi yang telah dilakukan kepada Pemerintah Desa Sidareja dalam menjalankan program Kampung KB.